



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA  
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**KE KOMITE PEMERIKSA KEUANGAN (STATE AUDIT COMMITTEE)/  
KOMISJA DO SPRAW KONTROLI PAŃSTWOWEJ (KOP)  
PADA MAJELIS RENDAH (SEJM) REPUBLIK POLANDIA  
DAN KANTOR PEMERIKSA KEUANGAN (*THE SUPREME AUDIT OFFICE*)/  
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI (NIK)  
DI NEGARA POLANDIA  
18 JUNI s.d. 24 JUNI 2023**



**BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**2023**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>3</b>
<b>BAB II</b>	<b>PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB III</b>	<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>21</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>29</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dibentuk kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). DPR RI memiliki tiga fungsi, anggaran; legislasi; dan pengawasan. Untuk memperkuat pelaksanaan fungsi anggaran, dibentuk Badan Anggaran. Kemudian untuk memperkuat fungsi legislasi, dibentuk Badan Legislasi. Maka untuk memperkuat fungsi pengawasan, dibentuklah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A, ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. Dalam Pasal 23 E ayat (2) disebutkan bahwa “Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya”. Pada ayat (3) disebutkan bahwa “Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang”.

Kemudian Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, Pasal 72 huruf d menyebutkan bahwa: “DPR bertugas, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah; dan huruf e menyebutkan “DPR membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK”.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, Pasal 112D

ayat 1 menyebutkan: “BAKN bertugas: a. melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR; b. menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; c. menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan d. memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan. Pada ayat (2) disebutkan: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BAKN dapat meminta penjelasan dari BPK, Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Dasar hukum yang mendasari dilaksanakannya kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Luar Negeri adalah ketentuan Pasal 145 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang menyatakan bahwa “Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, Panitia Khusus, atau Badan Anggaran dapat mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri dengan dukungan anggaran DPR dan persetujuan Pimpinan DPR”.

Kunjungan Teknis ke negara lain ini adalah salah satu proses pembelajaran dengan cara *Learning By Doing* bagi Anggota Parlemen untuk menambah wawasan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan mitra kerjanya.

Hasil kunjungan teknis diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi anggota delegasi dalam melakukan fungsi pengawasan, hal ini disebabkan karena adanya *transfer of knowledge* dari negara yang dikunjungi oleh anggota delegasi.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21, dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
3. Keputusan Rapat BAKN DPR RI tanggal April 2023.

### **C. PROFIL NEGARA YANG DIKUNJUNGI**

Negara Polandia adalah sebuah negara republik di Eropa Tengah yang berbatasan dengan Jerman di sebelah barat, perbatasan Oder-Neisse, Ceko dan Slowakia di sebelah selatan, Rusia, Lituania di sebelah timur laut dan Belarus serta Ukraina di sebelah timur. Polandia adalah negara anggota Uni Eropa (UE). Ibu Kota Polandia dan kota terbesar Polandia adalah Warsawa.

Negara Polandia adalah negara yang maju dan kuat di kawasan UE dan memiliki ekonomi terbesar kedelapan dan salah satu yang paling dinamis di UE. Polandia mempertahankan ekonomi berpenghasilan tinggi bersama dengan standar hidup yang sangat tinggi, kualitas hidup, keselamatan, pendidikan, dan kebebasan ekonomi. Polandia memiliki pasar domestik yang kuat, utang swasta rendah, tingkat pengangguran rendah, mata uang fleksibel, dan tidak bergantung pada sektor ekspor tunggal. Polandia adalah satu-satunya ekonomi Eropa yang terhindar dari resesi 2008.

Kekuasaan eksekutif di Polandia dilaksanakan oleh pemerintah, yang terdiri atas dewan menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Anggotanya biasanya dipilih dari koalisi mayoritas di Sejm. Kekuasaan legislative dilaksanakan oleh pemerintah dan dua lembaga parlemen, Sejm (Majelis Rendah Parlemen Polandia) dan Senat (Majelis Tinggi Parlemen Polandia). Sejm merupakan Dewan Perwakilan ini terdiri dari 460 anggota yang dipilih oleh rakyat dan dipimpin oleh seorang ketua yang bergelar "Marsekal Sejm Republik Polandia". Anggota parlemen dipilih dari perwakilan partai, dengan syarat bahwa partai minoritas-non-etnis harus mendapatkan setidaknya 5% suara nasional untuk memasuki Sejm. Saat ini ada empat partai di parlemen. Pemilihan umum parlemen dilakukan setiap

empat tahun. Presiden, sebagai kepala negara, adalah panglima tertinggi Angkatan Bersenjata dan memiliki kekuasaan untuk memveto undang-undang yang disahkan oleh parlemen. Pemilihan presiden diselenggarakan 5 tahun sekali.

Komite Pemeriksa Keuangan/*State Audit Committee/ Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)* merupakan salah satu komite pada Sejm Republik Polandia. Ruang lingkup kegiatan KOP meliputi kegiatan Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Ketenagakerjaan Nasional. KOP bertugas untuk mengeluarkan pendapat tentang rencana kerja dan laporan tahunan kegiatan Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Ketenagakerjaan Nasional khususnya memeriksa anggaran dan laporan pelaksanaannya. Selanjutnya KOP mengeluarkan pendapat tentang rancangan undang-undang Badan Pemeriksa Keuangan dan undang-undang Inspektorat Ketenagakerjaan Nasional. KOP memberikan pendapat tentang keputusan lain dari badan Sejm serta mosi dan materi yang dihasilkan dari Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya KOP mengajukan mosi kepada Sejm untuk segera memberikan informasi tentang hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta melakukan penilaian berkala terhadap kegiatan Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Ketenagakerjaan Nasional, termasuk analisis audit yang dilakukan dan implementasi pernyataan pasca inspeksi dan mengirimkannya ke Marsekal Sejm, serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kamar akuntansi daerah.

Kantor Pemeriksa Keuangan (*The Supreme Audit Office*) /*Najwyższa Izba Kontroli (NIK)* adalah badan audit negara independen teratas yang misinya adalah untuk menjaga pengeluaran publik. Selama lebih dari 100 tahun, lembaga ini telah melihat cara negara bagian Polandia beroperasi dan bagaimana membelanjakan dana publik. Lembaga ini didirikan sebagai salah satu lembaga pertama di Polandia yang merdeka dan bangkit kembali. Setiap negara yang ingin berfungsi

secara efisien, membutuhkan lembaga audit yang kompeten, independen dari kekuasaan eksekutif, untuk mengamankan uang publik.

*The Supreme Audit Office / NIK* ini beroperasi atas dasar prinsip kolegialitas, yang berarti bahwa ada badan khusus, yang disebut Dewan NIK (Polandia: Kolegium NIK), yang terlibat dalam proses persetujuan dan adopsi dari dokumen paling penting yang diserahkan ke Sejm. Dewan terdiri dari NIK Presiden (Ketua Dewan), Wakil Presiden, Direktur Jenderal dan empat belas anggota lainnya. *The Supreme Audit Office* menyampaikan kepada Sejm analisis pelaksanaan anggaran negara dan pedoman kebijakan moneter, pendapat tentang suara persetujuan untuk pemerintah, pengumuman hasil audit dan laporan tahunan tentang kegiatannya.

*The Supreme Audit Office* melakukan audit terkait, terutama, pelaksanaan anggaran negara serta pengeluaran keuangan publik dan pengelolaan properti publik oleh badan pemerintah negara bagian dan lokal dan entitas ekonomi. Setiap tahun, NIK menyerahkan tiga dokumen utama ke Sejm diantaranya analisis pelaksanaan anggaran negara dan pedoman kebijakan moneter, pendapat tentang pemungutan suara untuk Dewan Menteri, dan laporan tahunan kegiatan *The Supreme Audit Office*.

#### **D. ALASAN KUNJUNGAN KERJA**

Akuntabilitas merupakan konsep dasar kinerja BAKN. Hal ini karena BAKN melalui tugas dan fungsinya bertujuan untuk memastikan penggunaan keuangan negara akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAKN juga memastikan agar penggunaan keuangan negara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi pengawasan DPR RI yang dilakukan oleh BAKN bertujuan agar akuntabilitas sektor publik dalam penggunaan keuangan negara terlaksana di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 3 menyebutkan bahwa salah satu asas-asas umum penyelenggaraan negara adalah Asas Akuntabilitas yang berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping asas akuntabilitas, fungsi pengawasan oleh BAKN juga mendorong penggunaan keuangan negara yang efisien dan efektif bagi seluruh lembaga negara dan pengguna keuangan negara.

BAKN 2019-2024 merupakan alat kelengkapan dewan "termuda" pada DPR RI periode 2019-2024 mengingat BAKN baru kembali dibentuk pada tahun 2018 sehingga membutuhkan contoh pola kerja yang baik dari alat kelengkapan dewan serupa di negara-negara lain. Saat ini, BAKN masih terus mencari bentuk pola kerja terbaiknya dalam mengawasi penggunaan keuangan negara. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa hal utama yang menjadi isu utama pengawasan keuangan negara yang dilakukan oleh BAKN yaitu:

1. Peningkatan kualitas penelaahan hasil pemeriksaan BPK. Dengan kualitas penelaahan yang komprehensif dan berkualitas baik, dapat menjadi dasar dalam melakukan keputusan politik DPR RI terkait penggunaan keuangan negara oleh seluruh entitas yang mendapatkan pendanaan dari keuangan negara.
2. Pola kerja terkait tindak lanjut hasil pembahasan komisi terhadap hasil temuan BPK. Dengan pola kerja BAKN saat ini yang sifatnya "*bottom up*", perlu diketahui mekanisme tindak lanjut yang dilakukan oleh alat kelengkapan dewan negara lain yang memiliki tugas serupa dengan BAKN.
3. Hubungan BAKN dengan BPK RI selaku *supreme audit institution*. Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2018, disebutkan bahwa BAKN dapat memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.



Dalam hal ini BAKN perlu mengetahui hubungan kerjasama yang ideal antara BAKN dengan BPK. Kerjasama ini terutama mengenai data dari BPK yang menjadi basis penelaahan bagi BAKN.

4. Hubungan BAKN dengan lembaga-lembaga lain yang menggunakan keuangan negara dan juga merupakan *counterpart* dari komisi-komisi di DPR RI.

#### E. TUJUAN KUNJUNGAN KERJA

Tujuan utama dari BAKN DPR RI berkunjung ke negara Polandia adalah sebagai berikut:

1. Memahami tugas, fungsi, wewenang dan gambaran secara umum mengenai **Sejm Republik Polandia** serta gambaran secara khusus **State Audit Committee** yang terkait dengan akuntabilitas keuangan negara dan **The Supreme Audit Office** atau **Najwyższa Izba Kontroli (NIK)** dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan negara.
2. Memahami mekanisme kerja antara **State Audit Committee** dengan **The Supreme Audit Office**, dan bagaimana **The Supreme Audit Office** mendukung kebutuhan Parlemen dalam melakukan pengawasan atas keuangan negara.
3. Mendapatkan gambaran jenis-jenis, ruang lingkup, *time schedule* pemeriksaan keuangan negara oleh, penyampaian hasil pemeriksaan kepada **Sejm Republik Polandia**, dan pembahasan lebih lanjut mengenai laporan hasil pemeriksaan antara **Sejm** dengan **The Supreme Audit Office**.
4. Mendapatkan gambaran bagaimana **State Audit Committee** melakukan penelaahan/reviu atas laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh **The Supreme Audit Office**, dan bagaimana hasil penelaahan tersebut disampaikan kepada **Sejm** dan *committee* lainnya yang terkait.

Mendapatkan gambaran hubungan kerja antara **State Audit Committee** dengan *committee* lain di **Sejm**, khususnya terkait hasil pemeriksaan **The Supreme Audit Office** terhadap mitra kerja *committee* lain.

## BAB II PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

### A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

Kunjungan **Komite Pemeriksa Keuangan/State Audit Committee** pada **Sejm Republik Polandia** dan **Kantor Pemeriksaan Keuangan/The Supreme Audit Office**, akan diikuti oleh 12 (dua belas) orang terdiri dari 9 (sembilan) Anggota DPR, 2 (dua) orang Staf Sekretariat BAKN DPR RI, dan 1 (satu) orang Tenaga Ahli BAKN DPR RI sebagai berikut.

NO.	NO. ANG	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1.	A-533	H. Wahyu Sanjaya, SE	P. Demokrat	Ketua BAKN
2.	A-201	Prof. Dr. Hendrawan Supratikno	PDIP	Wakil Ketua BAKN
3.	A-423	Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si.	PKS	Wakil Ketua BAKN
4.	A-314	H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H.	P. GOLKAR	Anggota
5.	A-83	Ir. Irwan Ardi Hasman	P. GERINDRA	Anggota
6.	A-404	Dr. Achmad Hatari, S.E. M.H.	P. NASDEM	Anggota
7.	A-26	H. Bachrudin Nasori, S.Si.,M.M.	PKB	Anggota
8.	A-495	Ahmad Najib Qodratullah, S.E.	PAN	Anggota
9.	A-476	Dr. H.M. Amir Uskara, M. KES.	PPP	Anggota
10.	-	Mardi Harjo	-	Kepala Sekretariat BAKN
11.	-	Deny Hariyanto	-	Staf Sekretariat BAKN
12	-	Mita Wahyuningsih	-	Tenaga Ahli BAKN

## B. AGENDA KEGIATAN

Kegiatan kunjungan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI adalah tanggal 18-24 Juni 2023, dengan agenda pertemuan dengan **Komite Pemeriksa Keuangan/State Audit Committee** pada **Sejm Republik Polandia** dan **Kantor Pemeriksaan Keuangan/The Supreme Audit Office**, sebagai berikut.

NO	HARI/TGL JAM	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	<b>SABTU, 17 JUNI 2023</b>		
	21.30	Delegasi sudah berkumpul di Bandara Soetta	
	22.00 – 23.30	<b>Check in penerbangan ke POLANDIA</b>	
2.	<b>MINGGU, 18 JUNI 2023</b>		
	01.10	Take off menuju Doha, Qatar	Terminal 3 Soekarno Hatta
	05.25 – 08.10	Transit di Doha, Qatar.	2 Jam 45 Menit
	08.05	Take off menuju Polandia	Bandara Warsawa
	13.15	Tiba di Warsawa	
	17.00	Check in Hotel	
	19.30	Makan Malam	
3.	<b>SENIN, 19 JUNI 2023</b>		
	07.00 – 08.00	Sarapan di Hotel	
	09.30 – 12.00	Rapat Tim Delegasi dengan KBRI persiapan pertemuan dengan <b>State Audit Committee, Sejm Republik Polandia</b>	
	12.00 – 13.30	Makan Siang	

NO	HARI/TGL JAM	KEGIATAN	KETERANGAN
	13.30 – 15.30	Melanjutkan Rapat Tim Delegasi dengan KBRI persiapan pertemuan dengan <b>The Supreme Audit Office Polandia</b>	
	19.30	Makan Malam	
<b>4.</b>	<b>SELASA, 20 JUNI 2023</b>		
	06.00 – 07.00	Sarapan di Hotel	
	09.30 – 11.30	Pertemuan dengan <b>The Supreme Audit Office Polandia</b>	Membahas mekanisme kerja <b>The Supreme Audit Office Polandia</b>
	12.00 – 13.00	Makan siang	
	13.00 – 15.00	Pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Polandia	Warsawa
	19.30	Makan Malam	
<b>5.</b>	<b>RABU, 21 JUNI 2023</b>		
	06.00 – 07.00	Sarapan di Hotel	
	10.00 – 12.00	Rapat Tim Delegasi dengan KBRI persiapan pertemuan dengan <b>State Audit Committee, Sejm Republik Polandia</b>	
	13.00 – 14.00	Makan siang	
	14.30 – 16.00	Melanjutkan Rapat Tim Delegasi dengan KBRI persiapan pertemuan dengan <b>State Audit Committee, Sejm Republik Polandia</b>	
	19.30	Makan Malam	
<b>6.</b>	<b>KAMIS, 22 JUNI 2023</b>		
	08.00	Sarapan Pagi	Rapat Intern
	09.00-11.00	Pertemuan dengan <b>State Audit Committee, Sejm Republik Polandia</b>	Membahas mekanisme kerja <b>State Audit Committee, Sejm Republik Polandia</b>

NO	HARI/TGL JAM	KEGIATAN	KETERANGAN
	12.00-13.00	Makan Siang	
	14.00 – 16.00	Kembali ke Hotel	
	19.00 – 20.00	Makan Malam	Hotel
<b>7.</b>	<b>JUMAT, 23 JUNI 2023</b>		
	06.00 – 07.00	Sarapan di Hotel	
	11.00 – 12.00	Rapat Tim Delegasi terkait Penulisan Laporan Kunjungan Kerja	
	12.00 – 13.00	Makan siang	
	13.00 – 15.00	Melanjutkan Rapat Tim Delegasi terkait Finalisasi Laporan Kunjungan Kerja	
	19.00-19.30	Makan Malam	
<b>8.</b>	<b>SABTU, 24 JUNI 2023</b>		
	06.30-07.00	Sarapan Pagi	
	10.00	Menuju Bandara Polandia	
	17.40	Take off menuju Doha	
	12.10-02.25	Transit di Doha, Qatar.	2 Jam 45 Menit
	02.25	Take off menuju Jakarta	
<b>9.</b>	<b>MINGGU, 25 JUNI 2023</b>		
	15.25	Tiba di Jakarta	Terminal 3 Soekarno Hatta

Adapun informasi yang didapat oleh para anggota delegasi BAKN DPR RI adalah sebagai berikut:

- Pertemuan dengan Komite Pemeriksa Keuangan/*State Audit Committee* pada Sejm Republik Polandia**

Pertemuan dengan *State Audit Committe* pada Sejm Republik Polandia dilakukan di gedung parlemen Polandia. Pada pertemuan tersebut dijelaskan bahwa *State Audit Commite* merupakan salah satu komisi pada Sejm Polandia berurusan dengan Inspektorat Ketenagakerjaan Polandia, *The Supreme Audit Office/ NIK* Polandia dan Kamar Akuntabilitas Intern.

Inspektorat Ketenagakerjaan di Polandia bertugas untuk melindungi hak para pekerja agar mereka bekerja berdasarkan kontrak dan mendapatkan gaji sesuai kontrak kerja. Inspektorat Ketenagakerjaan juga memeriksa komisi keamanan ditempat kerja seperti pembangunan gedung dengan memeriksa kemananannya apakah pekerja dimana bekerja sesuai peraturan keamanan.

NIK adalah lembaga yang memeriksa semua lembaga negeri di Polandia. Mereka juga memeriksa pelaksanaan anggaran negara dan melaporkan hasilnya kepada Sejm dengan fungsi untuk persetujuan pemerintah. Kamar Akuntabilitas Negara memeriksa keuangan pemerintah daerah tingkat kabupaten dan provinsi. Mereka juga memeriksa anggaran International.

Komite Pemeriksa Keuangan/*State Audit Committe* memiliki wewenang yang cukup luas diantaranya mempertimbangkan semua informasi yang diberikan oleh Inspektorat, NIK dan Kamar Akunbilitas. Komite juga dapat memberikan pendapat kepada Sejm akan tetapi tidak bisa mempengaruhi hasil laporan NIK maupun Inspektorat. Komite juga melakukan sidang untuk melihat apakah laporan anggaran NIK dan Inspektorat dilakukan dengan baik di tahun sebelumnya. Selanjutnya Komite bisa mengajukan mosi kepada ketua Sejm untuk memberikan persetujuan bahwa anggaran NIK atau Inspektorat dilaksanakan dengan baik atau ada pelanggaran.

NIK adalah lembaga yang melakukan pemeriksaan lembaga negara negeri dan perusahaan milik negara yang dilaksanakan dengan anggaran negara. NIK memeriksa bagaimana dana publik digunakan. Hasil laporan NIK nantinya akan dibahas dengan komite-komite tertentu pada Sejm sesuai dengan Kementerian yang diperiksa. Perlu ditegaskan lagi bahwa *State Audit Committe* dapat memberikan penilaian terhadap hasil laporan NIK apakah

laporan tersebut sudah dilakukan dengan baik, selanjutnya hasil penilaian akan disampaikan kepada kepada Sejm (berdasarkan informasi dan NIK dan Komisi).

Kerjasama dilakukan dengan inspektorat dan kamar akuntabilitas negara dan hasilnya dibahas dengan komisi bersama dengan lembaga yang diperiksa untuk membahas hasil pemeriksa. Jika terbukti adanya kesalahan mereka akan membahas bagaimana bisa diperbaiki serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah bagaimana bisa diperbaiki.

Saat ini *State Audit Committe* memiliki banyak tugas, dimana anggotanya sekaligus menjadi anggota komite lain pada parlemen. *State Audit Committe* juga dapat mempengaruhi susunan Dewan NIK dan inspektorat tenagakerjaan, karena dapat memberikan pendapat tentang calon untuk Jabatan Ketua dan Wakil Ketua NIK.

Ketua NIK ditunjuk oleh Sejm dan wakil ketua NIK dipilih oleh ketua Sejm. *State Audit Committe* juga memberikan pendapat tentang calon anggota dewan NIK karena bertindak atas prinsip kolegalitas. Selain ada ketua dan wakil ketua masih ada anggota dewan karena mereka memutuskan bersama tentang kebijakan mereka dan pemeriksaan. Anggota dewan NIK diangkat oleh Ketua Sejm. Jadi proses usulan untuk calon anggota dewan diajukan oleh ketua NIK sendiri nantinya Komisi akan memberikan pendapat tentang anggota masing-masing dan ketua Sejm memutuskan.

Dewan NIK adalah lembaga pertama yang melakukan penilaian atas hasil pemeriksaan NIK. Dewan NIK adalah lembaga satu-satunya yang bisa mengganti hasil pemeriksaan. Misalnya saat NIK melakukan pemeriksaan Kementerian Kesehatan, para auditor dapat memberikan pendapat bahwa Kementerian Kesehatan melakukan pelanggaran tertentu. Dalam hal ini, nantinya Dewan NIK setelah mempertimbangkan laporan tersebut bisa menyatakan bahwa Kementerian tersebut tidak melakukan pelanggaran. Biasanya lembaga yang diakui akan mengakui hasil pemeriksaan dan



pemerintah memutuskan langkah yang harus dilakukan untuk melakukan perbaikan.

Inspektorat tenagakerjaan sama dengan NIK juga melaporkan hasil pemeriksaan kepada Sejm. Jika ada laporan inspektorat, Sejm akan memeriksa apakah ada temuan-temuan yang dilaporkan inspektorat. Jika ada permasalahan maka Komisi akan memberikan rekomendasi untuk penyelesaian masalah. Perlu ditegaskan bahwa, sama seperti NIK dan inspektorat secara penuh independen dan tidak bisa dilakukan pemecatan kecuali anggota tersebut melakukan kejahatan ataupun sakit dan mereka tidak bisa melakukan pekerjaan.

Anggota Sejm dan NIK sama-sama memiliki posisi yang kuat. Posisi NIK bisa dianggap kuat karena dapat mengajukan hasil pemeriksaan kepada Sejm dan komite. Jika komite tidak senang dengan hasil laporan NIK, maka mereka akan langsung tau karena mereka berpartisipasi dalam melakukan diskusi. Tapi Komite tidak bisa mengubah hasil laporan NIK.

Partai politik memiliki peran dalam menentukan anggota dewan NIK. Calon dewan NIK diajukan oleh NIK pada Sejm. Komite hanya memberikan pendapat tentang calon masing-masing dan ketua Sejm memutuskan apakah calon tersebut masuk atau tidak. Jadi tidak bisa dilakukan apa-apa tanpa inisiatif dari ketua NIK dan tidak bisa melakukan apa-apa tanpa persetujuan dari Ketua Sejm. Jadi harus ada konsensus antara Ketua NIK dan Ketua Sejm.

Ketua Sejm mewakili mayoritas yang berkuasa dan mewakili untuk mengatakan iya atau tidak tentang calon-calon tertentu. Jabatan ketua NIK tidak tentu berasal dari partai berkuasa karena Masa jabatan Sejm 4 tahun dan masa jabatan ketua NIK 6 tahun.

Negara Polandia adalah negara demokratis. Dua lembaga awal yang berdiri di Polandia adalah NIK dan Inspektorat, dimana keduanya adalah dua pilar negara Polandia saat itu. Selama lebih dari 100 tahun kedua lembaga tersebut membangun identitas mereka dan pengaruh mereka untuk fungsinya dengan baik bagi negara Polandia. Kedua lembaga ini selama 100 tahun

mengajukan laporan mereka kepada Sejm, dan dokumen hasil laporan tersebut hasilnya tidak dapat digugat, tidak bisa diubah angkanya dan kesimpulannya tidak dapat diubah.

Dokumen hasil pemeriksaan tersebut adalah dokumen yang objektif dan tidak berpihak. Meskipun dokumen tersebut dibahas di komisi, dan ada kontroversi akan tetapi dokumen tersebut tidak bisa diubah dan akan tercatat dalam sejarah. Hasil pemeriksaan NIK akan seperti pemeriksaan dalam negeri akan mempengaruhi kehidupan politik Polandia. Jika ada pelanggaran besar yang dilakukan suatu lembaga maka kejahatan itu akan dilaporkan kepada kejaksaan. Jika ada pelanggaran yang menurut NIK tidak perlu dilaporkan ke kejaksaan akan tetapi nantinya menurut Komisi perlu dilaporkan maka Komisi akan melaporkan kembali kepada NIK bahwa kasus ini harus dilaporkan pada kejaksaan.

Anggaran NIK di Polandia juga akan menyesuaikan dengan kondisi perekonomian negara. Pada usulan anggaran tahun 2023, ketua NIK mengajukan kenaikan gaji 20%, akan tetapi yang disetujui kenaikan sebesar 7%. Sesuai dengan keputusan pemerintah bahwa kenaikan gaji pada administrasi publik bisa naik 5-7% pada tahun 2023.

Auditor di badan pemeriksaan biasanya auditor akan digaji lebih kecil daripada orang yang lembaga yang diperiksa sendiri. Jika ada auditor yang bagus, maka ketua NIK bisa memberikan bonus sampai dengan 50% tambahan dari gaji pokok.

Kenaikan gaji di parlemen tidak begitu tinggi jika dibandingkan kenaikan gajinya di institusi publik. Jika situasi anggaran baik maka bisa naik gaji tapi biasanya lebih rendah dari administrasi publik lainnya. Jika situasi anggaran buruk maka yang terkena dampak adalah parlemen.

Pihak yang mengusulkan kenaikan gaji adalah yang mengusulkan anggaran. Undang-Undang anggaran ini nantinya akan diusulkan kepada Sejm. Usulan dari oposisi bisa atau tidak bisa disetujui oleh Sejm dan Senat. Jika oposisi ingin mengajukan kenaikan gaji lembaga tertentu maka harus

menentukan dari sumber mana pendanaan untuk bisa mendapatkan kenaikan gaji.

Otoritas pemerintah pusat yang dapat menentukan skala prioritas pihak yang berhak mendapatkan kenaikan gaji adalah Kementerian Keuangan. Usulan dapat diajukan oleh lembaga manapun akan tetapi kementerian keuangan yg mengetahui kondisi keuangan negara. Jika Sejm mencoba untuk menyetujui semua usulan dari lembaga negara maka anggaran bisa dua kali lipat dan dapat mengakibatkan inflasi.

Periode masa jabatan anggota parlemen tidak terbatas dengan masa jabatan 4 tahun. NIK bisa menentukan anggaran sendiri kepada menteri keuangan akan tetapi setelah adanya diskusi dengan Sejm bisa berubah. Tidak ada upaya dari NIK untuk menentukan anggarannya sendiri karena mereka independen. Akan tetapi seperti seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ini akan sulit dilaksanakan karena anggaran negara, apabila ada pergantian oposisi partai akan sulit dilaksanakan.

Di Polandia NIK adalah lembaga yang sangat dihormati oleh masyarakat dan parlemen. Kemandirian NIK juga terjamin dalam UU dan UUD, selain itu parlemen dan NIK memiliki kerjasama yang baik baik.





Gambar 1. Pertemuan dengan Komite Pemeriksa Keuangan/*State Audit Committee* pada Sejm Republik Polandia

## 2. Pertemuan dengan *The Supreme Audit Office (NIK)* Polandia

Pertemuan dengan *Supreme Audit Office (NIK)* Polandia dilakukan di gedung NIK Polandia. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa NIK Polandia merupakan salah satu lembaga tertua di Polandia yang telah berdiri lebih dari 100 tahun. Kerjasama antara NIK dengan lembaga Audit International dimulai pada tahun 2006 dan membawa banyak hasil.

NIK didirikan pada 7 Februari 1919 oleh Kepala Negara Polandia, Józef Piłsudski. NIK dipimpin oleh Presiden, selanjutnya 3 Wakil Presiden NIK diusulkan oleh Presiden NIK ditunjuk oleh Ketua Sejm. Direktur Jenderal NIK (Kepala Staf NIK) diangkat oleh Presiden NIK dengan persetujuan Ketua Sejm. Mandat NIK mencakup seluruh badan pemerintah pusat dan daerah. NIK juga dapat mengaudit unit organisasi dan perusahaan untuk mengetahui sejauh mana mereka

menggunakan properti atau sumber daya negara negara, atau menggunakan anggaran negara.

Dewan NIK terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Direktur Jenderal, 7 anggota eksternal (profesor Universitas), 7 anggota internal (Direktur atau Penasihat Presiden) dengan masa jabatan 3 tahun. Tugas dewan NIK adalah mengadopsi rancangan anggaran NIK, mengadopsi rencana kerja tahunan NIK, menyetujui Laporan Tahunan NIK, menyetujui Laporan Pelaksanaan APBN, dan melewati pendapat tentang suara persetujuan untuk pemerintah.

Audit NIK pada tahun 2020 terdiri dari 66,7% audit kinerja, 27% audit kepatuhan dan 5,4% audit keuangan. Rencana kerja tahunan NIK mencakup 60% saran audit dari DPR (Sejm dan Senat), Komisaris HAM, Perdana Menteri. Hasil pelaksanaan NIK pada tahun 2020 dalam Laporan Kegiatan Tahunan yang disampaikan kepada Sejm diantaranya audit entitas tunggal 2007, 1629 entitas yang diaudit, 91 topik yang dibahas oleh audit terencana, 63 topik yang dibahas oleh audit ad hoc, 481 pertemuan Komite Parlemen dengan para ahli NIK, 213 dokumen diserahkan ke Sejm, dan audit organisasi internasional.

NIK Polandia diundang oleh BPK dalam pertemuan G20 di Bali, dimana acara ini sangat meningkatkan prestige Indonesia dan semua lembaga yang datang dari luar negeri. NIK Polandia dengan BPK menekankan pentingnya lembaga audit di semua negeri, karena melalui audit kami juga mempengaruhi pemerintah untuk memperbaiki fungsinya aparat dan lembaga dimana uang masyarakat dipergunakan.

Ancaman terbesar lembaga-lembaga audit di berbagai negara adalah monopoli kekuasaan, dimana ketika ada satu partai berkuasa di parlemen akan mengontrol semuanya. Tugas utama dari NIK adalah melakukan pemeriksaan pada pemerintah, lembaga negara maupun perusahaan milik negara dan menghasilkan hasil laporan pemeriksaan. Pejabat NIK diharapkan tidak berpihak dan independen secara penuh. Laporan NIK tidak selalu disukai oleh pemerintah. NIK sebagai lembaga audit dan lembaga audit di negara manapun berupaya untuk menjaga dana publik karena merupakan dana dari masyarakat. Masyarakat berhak

mengetahui bagaimana uang tersebut digunakan, apakah digunakan secara legal efisien dan efektivitas.

Berdasarkan sistem di Polandia ketua NIK dipilih setiap 6 tahun oleh parlemen. Kantor pusat NIK memiliki 17 departemen, selain itu juga terdapat kantor perwakilan di masing-masing provinsi. Tugas utama NIK adalah pemeriksaan anggaran negara yang harus dilakukan secara rutin dimana tugas tersebut tercatat dalam undang-undang tentang NIK. Setiap tahun NIK akan memeriksa bagaimana anggaran negara digunakan.

NIK juga dapat melakukan audit atas permintaan parlemen, dari warga, atau juga presiden dari Perdana Menteri maupun dari organisasi non pemerintah saat ada kecurigaan atas lembaga tertentu. Persetujuan atas adanya audit tersebut, harus dibuat oleh badan khusus dalam NIK yaitu Dewan NIK. Dewan NIK terdiri dari ketua, dua wakil ketua, tujuh staf senior yang berpengalaman dan tujuh ahli senior yang berpengalaman dari luar seperti profesor ekonomi atau hukum. Pemilihan anggota Dewan NIK harus mendapat persetujuan dari Ketua Sejm.

Berdasarkan undang-undang tentang NIK, NIK mempunyai hak untuk melakukan audit ad-hoc atas inisiatif dari NIK sendiri. Audit Ad-hoc dapat dilakukan secara cepat dengan menentukan topik dan program pemeriksaan. Dengan audit tersebut NIK bereaksi tentang berita-berita yang muncul di masyarakat tentang sesuatu yang tidak benar. Salah satu contoh audit ad-hoc yang dilakukan NIK tahun lalu adalah ketika di media Polandia muncul berita tentang keracunan air sungai. Keracunan air di sungai dimana menyebabkan ribuan ton ikan dibuang. Secara cepat NIK mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas situasi tersebut.

NIK sangat aktif dipangung internasional dan baru saja dipilih untuk melakukan audit Interpol Polisi Internasional. NIK dinilai menjadi lembaga penting yang dapat membawa perubahan besar. NIK baru saja mengunjungi Belgia untuk bertemu dengan pejabat-pejabat polisi di seluruh dunia untuk menjelaskan bagaimana prosedur pemeriksaan akan berlangsung. Para auditor NIK sangat dihormati di luar negeri dan berpartisipasi dalam banyak proyek Uni Eropa dan

melakukan pemeriksaan internasional Palestina dan Georgia. NIK juga memiliki pusat pelatihan para auditor di Warsaw, tidak hanya auditor NIK akan tetapi bisa juga diundang auditor luar negeri dimana NIK pernah memberikan penawaran kepada Ketua BPK.

Dalam pertemuan internasional NIK sering berbagi pengalaman dengan lembaga audit dari luar negeri karena sebenarnya permasalahan di dunia yang hampir sama. Permasalahan baru yang kini muncul adalah tentang perlindungan alam dan artifisial interlegent yang harus dihadapi.

Anggaran NIK ditentukan oleh pemerintah, dimana permasalahannya hasil temuan tidak selalu disukai oleh pemerintah. Gaji pegawai NIK 30% lebih rendah dari pegawai pemerintah di Kementerian. Adanya rencana dari NIK untuk menyusun undang-undang baru agar anggarannya dihubungkan dengan GDP, jadi akan membuat lembaga stabil dan independen. Anggaran NIK ditentukan oleh parlemen yang masuk dalam undang-undang keuangan negara. Permasalahan yang terjadi di Polandia sama dengan di Indonesia dimana porsi anggaran BPK tidak cukup besar.

Diperkirakan kebocoran anggaran di Polandia mencapai 25%, dimana anggaran tersebut lepas kendali dari pengawasan. Hal ini merupakan permasalahan yang dikritik oleh NIK dan tidak disukai oleh mayoritas. Inflasi di Polandia secara resmi 14%, akan tetapi secara nyata lihat dari kenaikan harga makanan inflasi sekitar 25%.

Shadow economy merupakan suatu keuangan yang tidak tercatat yang dapat bersumber dari judi dan narkoba. Shadow economy di Polandia sekitar 19,6%. Rekomendasi dari NIK adalah meningkatkan transparansi anggaran negara pada semua lembaga pemerintah. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah reformasi beberapa badan di bawah Kementerian Keuangan seperti kantor pajak menkosolidasi menjadi satu agar lebih efektif sehingga fraud pajak turun dari 26% menjadi 10% dan mengakibatkan penghasilan pajak meningkat.

NIK Polandia telah melakukan banyak pemeriksaan salah satunya pada kepolisian. Banyak temuan tentang kepolisian dan NIK berani melakukan



pemeriksaan tentang Kepolisian Polandia. NIK memiliki dua departemen terkait pemeriksaan tersebut yaitu Departemen Keamanan yang melakukan audit Polisi dan Departemen Pertahanan Nasional yang memeriksa Tentara.







Gambar 2. Pertemuan dengan The Supreme Audit Office (NIK) Polandia

### 3. Pertemuan dengan KBRI di Warsaw, Polandia

Selama di Warsaw, Polandia. Delegasi BAKN DPR RI juga melakukan pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Negara Polandia. Dalam pertemuan tersebut, Dubes RI menyampaikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut.

- a. Menyambut baik kunjungan Delegasi BAKN DPR RI dikarenakan bisa melakukan transformasi informasi secara langsung antara BAKN DPR RI (legislatif) dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia.
- b. Bahwa pertemuan yang dilaksanakan antara BAKN DPR RI dengan parlemen Polandia dan NIK Polandia yang mengikutsertakan pihak KBRI menghasilkan hal yang sangat positif serta informasi-informasi yang sangat bermanfaat serta sangat berkualitas bagi kedua belah pihak.

- c. Diharapkan dengan adanya kunjungan Delegasi BAKN DPR RI dapat mendapatkan konsep pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara yang lebih baik dan dapat menjadi dasar dalam penerapan serta perbaikan pada sistem pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara di Indonesia.





Gambar 3. Pertemuan dengan KBRI di Warsaw, Polandia



### **BAB III**

#### **KESIMPULAN**

1. *State audit Commite* merupakan salah satu komisi pada Sejm Polandia. Komisi merupakan berurusan dengan hal yang berkaitan dengan Inspektorat Ketenagakerjaan Polandia, *The Supreme Audit Office/ NIK* Polandia dan Kamar Akuntabilitas Intern.
2. Komite Pemeriksa Keuangan/*State Audit Committe* mempertimbangkan semua informasi yang diberikan oleh Inspektorat, NIK dan Kamar Akunbilitas. Komite juga dapat memberikan pendapat kepada Sejm akan tetapi tidak bisa mempengaruhi hasil laporan NIK maupun Inspektorat.
3. *The Supreme Audit Office/NIK* Polandia merupakan salah satu lembaga tertua Polandia yang telah berdiri lebih dari 100 tahun. Periode jabatan ketua NIK adalah selama 6 tahun. Calon dewan NIK diajukan oleh NIK pada Sejm. Komisi hanya memberikan pendapat tentang calon masing-masing dan ketua Sejm memutuskan apakah calon tersebut masuk atau tidak.
4. Ancaman terbesar lembaga-lembaga audit di negara manapun adalah monopoli kekuasaan, dimana ketika ada satu partai berkuasa di parlemen akan mengontrol semuanya. Tugas utama dari NIK adalah melakukan pemeriksaan pada pemerintah, lembaga negara maupun perusahaan milik negara dan menghasilkan hasil laporan pemeriksaan. Pejabat NIK diharapkan tidak berpihak dan independen secara penuh.
5. NIK juga dapat melakukan audit atas permintaan parlemen, dari warga, atau juga presiden dari Perdana Menteri maupun dari organisasi non pemerintah saat ada kecurigaan atas lembaga tertentu. Persetujuan atas adanya audit tersebut, harus dibuat oleh badan khusus dalam NIK yaitu Dewan NIK. Dewan NIK terdiri dari ketua, dua wakil ketua, tujuh staf senior yang berpengalaman dan tujuh ahli senior yang berpengalaman dari luar seperti profesor ekonomi atau hukum. Pemilihan anggota Dewan NIK harus mendapat persetujuan dari Ketua Sejm.

6. Berdasarkan undang-undang tentang NIK, NIK mempunyai hak untuk melakukan audit ad-hoc atas inisiatif dari NIK sendiri. Audit Ad-hoc dapat dilakukan secara cepat dengan menentukan topik dan program pemeriksaan. Dengan audit tersebut NIK bereaksi tentang berita-berita yang muncul di masyarakat tentang sesuatu yang tidak benar. Salah satu contoh audit ad-hoc yang dilakukan NIK tahun lalu adalah ketika di media Polandia muncul berita tentang keracunan air sungai. Keracunan air di sungai dimana menyebabkan ribuan ton ikan dibuang. Secara cepat NIK mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas situasi tersebut

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI ke Negara Polandia ini disampaikan. Kiranya laporan ini nantinya akan dapat menjadi bahan kajian, pertimbangan dan rujukan dalam meningkatkan peran dan fungsi BAKN DPR RI dalam menjalankan tugasnya.

**Jakarta, Juni 2023**

**BADAN AKUNTABILITAS  
KEUANGAN NEGARA DPR RI,  
KETUA**

**H. WAHYU SANJAYA S.E.**

**A-533**